



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 71/KEP-BPSDMKP/2015

TENTANG

PENYULUH PERIKANAN BANTU  
PENDAMPING PROGRAM PRIORITAS  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyuluhan perikanan yang menjadi program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Badan/Instansi yang menangani penyuluhan Perikanan Kabupaten/Kota di Indonesia, perlu adanya Penyuluh Perikanan Bantu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENYULUH PERIKANAN BANTU PENDAMPING PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 sebagaimana tersebut pada kolom 2 sebagai tenaga pendamping program kelautan dan perikanan tahun 2015 untuk ditempatkan di wilayah sebagaimana tersebut pada kolom 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Masa kontrak kerja Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai 1 Oktober 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

KETIGA : Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

1. membantu melakukan kegiatan penyuluhan perikanan dengan berkonsultasi kepada Penyuluh Perikanan PNS sesuai dengan wilayah penempatan;
2. melakukan kunjungan pembinaan kepada pelaku utama dan pelaku usaha kepada sasaran penyuluhan baik perseorangan/angjansana dan ataupun kelompok;
3. memberikan bimbingan dan pendampingan manajemen, teknis, dan pemasaran usaha perikanan serta pola usaha kepada kelompok secara berkelanjutan;
4. membantu dan mendampingi kelompok dalam penyusunan dokumen administrasi lainnya;
5. membantu memfasilitasi kemudahan akses kelompok terhadap permodalan usaha, sarana produksi, teknologi, dan pasar;
6. membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Kelompok Pelaku Utama Perikanan; dan
7. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan setiap bulan kepada Kepala Pusat Penyuluhan KP dan ditembuskan ke Dinas Kabupaten/Kota dan eselon I terkait sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

KEEMPAT ...



- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Penyuluh Perikanan Bantu Pendamping Program Prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulan untuk kegiatan bulan selanjutnya.
- KELIMA : Penyuluh Perikanan Bantu Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menerima honorarium sebesar :
1. Rp.1.900.000,-/orang/bulan untuk tingkat pendidikan S1/D IV; serta
  2. Rp.1.800.000,-/orang/bulan untuk tingkat pendidikan D III.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada anggaran Satuan Kerja Pusat Penyuluhan KP Tahun Anggaran 2015.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2015  
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd

SUSENO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian,



Pranoto Adi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR 71/KEP-BPSDMKP/2015  
TENTANG PENYULUH PERIKANAN BANTU  
PENDAMPING PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015

PENYULUH PERIKANAN BANTU  
PROGRAM PRIORITAS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2015

I. PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM

No	NAMA	KABUPATEN/KOTA
1	2	3
1.	Santi Purnama Sari, S.Tr.Pi	Banda Aceh
2.	Miranda Riskya, S.Tr.Pi	
3.	Ikhsan, S.Tr.Pi	
4.	Arita Wahyuni, S.Tr.Pi	Kabupaten Langsa
5.	Fahrin Nisa, S.Tr.Pi	
6.	Muhammad Agam Putere Rinjani Agung, S.Tr.Pi	Kabupaten Nagan Raya
7.	Amir, S.Tr.Pi	Kabupaten Aceh Barat
8.	Riski Arif Miranata, S.Tr.Pi	Kabupaten Aceh Besar
9.	Indah Kesuma Wardani, S.St.Pi	Kabupaten Aceh Tamiang
10.	Abdul Rahman, A.Md	Kabupaten Simeulue
11.	Mahrus Sofi, A.Md	
12.	Rofi Nurmayanto, A.Md	
13.	Juniardi, A.Md	
14.	Miftahul Fadli, A.Md	

II. PROVINSI SUMATERA UTARA

No	NAMA	KABUPATEN/KOTA
1	2	3
1.	Christoper Bros Harianto Tampubolon, S.Tr.Pi	Kabupaten Sibolga
2.	Rachman Sawaluddin Tanjung, S.Tr.Pi	
3.	Angga Prayoga, S.Tr.Pi	Kabupaten Tapanuli Tengah
4.	Septriwan Husein Pasaribu, S.Tr.Pi	
5.	Ryan Gunawan, S.Tr.Pi	Kota Binjai
6.	Elsa Caroline Situmorang, S.Tr.Pi	Kota Medan
7.	Natalya Chrismayanti Manullang, S.Tr.Pi	

8. Rizki Hardiyanti Wardiah, S.Tr.Pi ...



XVI. PROVINSI JAWA TIMUR

No	NAMA	KABUPATEN/KOTA
1	2	3
1.	Giri Andrea, S.Tr.Pi	Kabupaten Banyuwangi
2.	Herman Puji Effendi, A.Md	
3.	Norma Novitasari, S.Tr.Pi	Kabupaten Trenggalek
4.	Citra Duana Putri, A.Md	
5.	Eko Firmansyah, S.Tr.Pi	Kabupaten Lamongan
6.	Hartanti Nurulaini, S.Tr.Pi	
7.	Danu Rahyib, S.Tr.Pi	Kabupaten Pacitan
8.	Ach. Firzan Kuffal, S.Tr.Pi	Kabupaten Sumenep
9.	Gunputra Veptian Cahya, S.Tr.Pi	Kabupaten Tulungagung
10.	Elina Dwitamaya, A.Md	
11.	Dewi Nurmalita Suseno, S.Tr.Pi	Kabupaten Sidoarjo
12.	Arie Putri Widayati, A.Md	Kabupaten Kediri
13.	Yuniardi, A.Md	Kabupaten Madiun
14.	M. Aris Sirojul Ulum, A.Md	Kabupaten Malang
15.	Imam Marjuki, A.Md	Kabupaten Bojonegoro
16.	Alfian Rizal Habibi, A.Md	Kabupaten Jember
17.	Uyung Prasetyo, S.Tr.Pi	Kabupaten Jombang
18.	Fatchur Rochman, S.Tr.Pi	Kabupaten Mojokerto

XVII. PROVINSI BALI

No	NAMA	KABUPATEN/KOTA
1	2	3
1.	I Wayan Deni Koriawan, S.Tr.Pi	Kabupaten Bangli
2.	Komang Gandi Adityawan, S.Tr.Pi	Kabupaten Buleleng
3.	Wariah, S.ST.Pi	Kabupaten Klungkung
4.	Yusuf Tantowi, A.Md	
5.	I Gede Loudry Mahendra, S.Tr.Pi	Kabupaten Karangasem
6.	I Gede Yahya Kama Jaya, S.Tr.Pi	Kabupaten Badung
7.	Gusti Ayu Dodecca Tria Palmita, S.Tr.Pi	
8.	I Putu Widiarma, S.Tr.Pi	Kabupaten Tabanan
9.	I Made Wisnu Suputra, S.Tr.Pi	
10.	I Gede Oka Gunawan, S.Tr.Pi	Kabupaten Gianyar
11.	Ni Ketut Nirmala Dewi, S.Tr.Pi	

XXVII. PROVINSI MALUKU UTARA

No	NAMA	KABUPATEN/KOTA
1	2	3
1.	Anggiyani Nafila Ariyuni, S.Tr.Pi	Halmahera Selatan

XXVIII. PROVINSI PAPUA

No	NAMA	KABUPATEN/KOTA
1	2	3
1.	Yuni Maria Lestari Situmorang, S.Tr.Pi	Kabupaten Biak Numfor

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ttd

SUSENO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Organisasi dan Kepegawaian,



Prainto Adi